



RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN GRESIK
2025 - 2029

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	12
2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah	15
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	25
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	26
2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	26
2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	26
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	27
2.2.2 Isu Strategis.....	28
BAB III TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	31
3.1. Tujuan dan Sasaran	31
3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029	35
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	37
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	37
4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	47
Program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2030 sebelum ditetapkan peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah.	59
4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	59
4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029	60
4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029 ..	64

4.6	Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	66
4.7	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD	70
BAB V PENUTUP		72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kabupaten Gresik merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) Tahun 2025 – 2029.

Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan dalam Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang akan disusun setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Penyusunan rencana strategis diawali dari hasil rumusan Tim Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang di konsultasikan kepada stakeholder (pelaku kepentingan) masyarakat bidang kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik.

Penyusunan renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Kebijakan Umum dan program pembangunan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 yang sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Gresik.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;

22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 adalah peraturan yang mengatur pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 -2029;
24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 /Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031;
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025
34. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008;

35. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
40. Peraturan Daerah RPJMD GRESIK nomor 3 tahun 2025
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 – 2031;
43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2032;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014- 2034;
45. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
46. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh Dinas Perikanan selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Dinas Perikanan.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029 adalah untuk :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;

2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja perangkat daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen anggaran (RKA/DPA) perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2025 – 2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : **PENDAHULUAN**, yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.
- BAB II : **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang berisi tugas, fungsi dan struktur organisasi PD, sumberdaya PD, kinerja pelayanan PD dan kelompok sasaran layanan PD.
- BAB III : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, yang berisi Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 2029, Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.
- BAB IV : **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, yang berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- BAB V : **PENUTUP**, yang berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

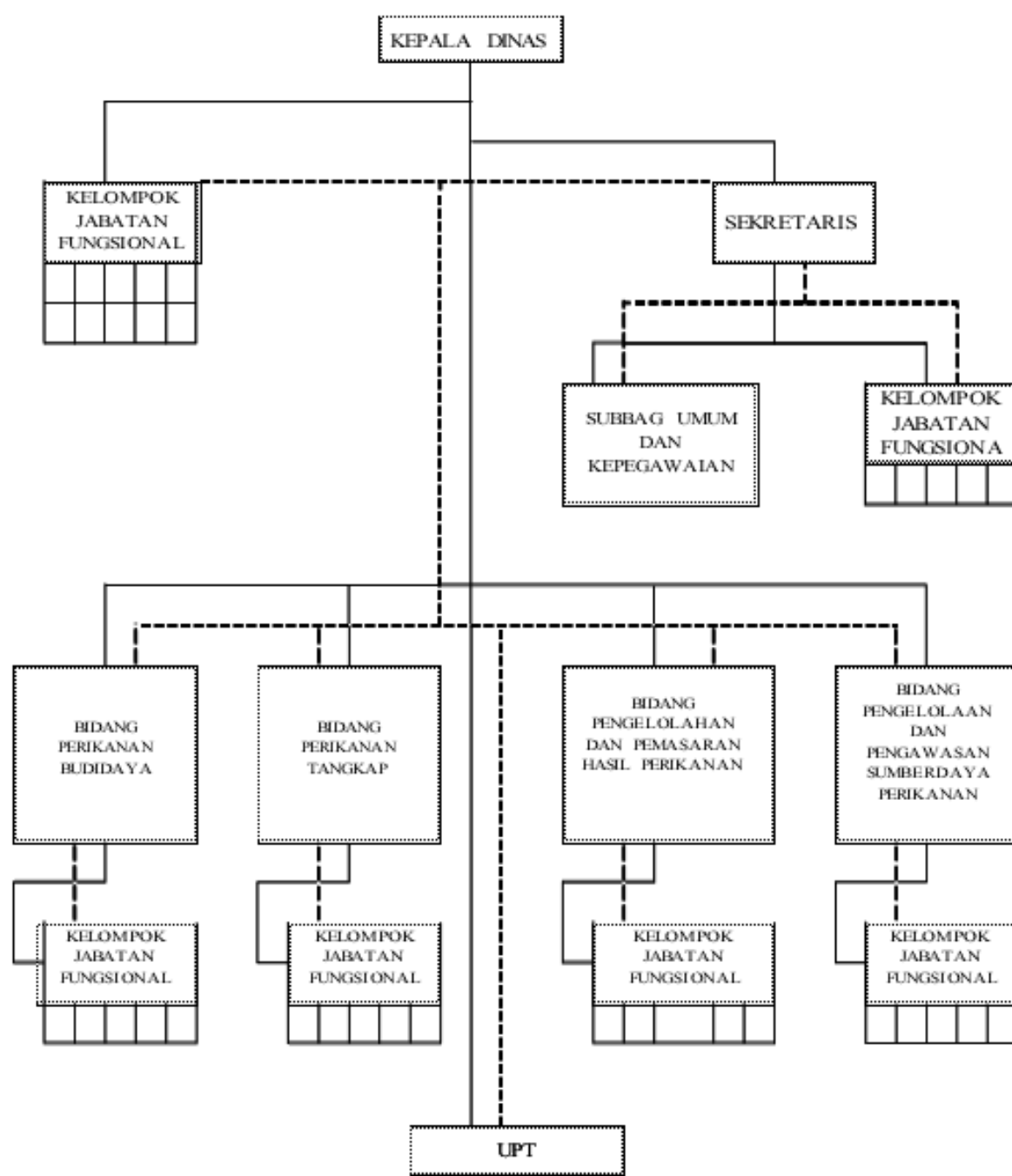
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 8 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati No. 39 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik, Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik.

Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2021 serta Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2018 terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Unit Pelaksana Perikanan Budidaya Air Tawar/ Payau
8. Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Campurejo

Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Gresik



2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok dan fungsi organisasi dengan tata kerja sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan

2. Fungsi Organisasi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas maka Dinas Perikanan mempunyai fungsi sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perikanan.

Rincian Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program urusan perikanan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan perikanan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi urusan perikanan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan perikanan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi urusan perikanan;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan perikanan; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasian penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas
- b. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;

- d. Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
 - e. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup Dinas;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya
- Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan budidaya;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan budidaya;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan budidaya;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan budidaya;
 - e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan budidaya;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan budidaya;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap
- Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang Perikanan Tangkap. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang perikanan tangkap;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang perikanan tangkap;

- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di bidang perikanan tangkap;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang perikanan tangkap;
 - e. Pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang perikanan tangkap;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya
5. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya

6. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan

Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan perikanan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan kebijakan dan perencanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan administrasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- e. Pelaksanaan program dan pengendalian kegiatan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi program di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan;
- g. Pelaksanaan pengkoordinasian monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengawasan sumber daya perikanan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

2.1.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik ditunjang oleh berbagai sumber daya, meliputi:

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai di Dinas Perikanan sejumlah 40 orang (terdiri dari PNS, PPPK, dan tenaga kontrak). Dengan kualifikasi pendidikan: terdiri dari S2, S1, Diploma, dan SMA/SMK sesuai kebutuhan teknis maupun administratif. Sebaran jabatan yaitu terdiri dari pejabat

struktural, pejabat fungsional serta staf administrasi. Berikut merupakan Pegawai Dinas Perikanan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan:

Tabel 1. Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Berdasa Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

NO	URAIAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
	Pangkat / Golongan Ruang	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)							-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)							-
	Juru (Ic)							-
	Juru Tingkat I (Id)							-
2.	Pengatur Muda (IIa)							-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)							-
	Pengatur (IIc)				9			9
	Pengatur Tingkat I (IId)			1				1
3.	Penata Muda (IIIa)			1		11		12
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)					3		3
	Penata (IIIc)							-
	Penata Tingkat I (IIId)					9		9
4.	Pembina (IVa)					2	2	4
	Pembina Tingkat I (IVb)						1	1
	Pembina Utama Muda (IVc)						1	1
	Pembina Utama Madya (IVd)							-
JUMLAH TOTAL								40

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan antara lain :

- Gedung Kantor Dinas : 2 Buah
- Gedung Kantor UPT Dinas : 2 Buah
- Gedung TPI : 1 Buah
- Musholla : 1 Buah
- Laboratorium dan Posikandu : 2 Buah
- Kendaraan Roda 4 : 8 Buah
- Kendaraan Roda 2 : 15 Buah

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang dimiliki Dinas Perikanan, disamping sebagai pelaksana teknis dinas juga mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah dari operasional bidang usaha yang dijalankan, beberapa unit usaha yang berjalan adalah :

1. Balai Benih Ikan (BBI) (Kerjasama Pemanfaatan)
2. Tambak Budidaya Udang Vanname (Kerjasama Pemanfaatan)
3. Kios TPI Lumpur (Kerjasama Pemanfaatan)
4. Unit Excavator (Kerjasama Pemanfaatan).

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam periode sebelumnya menunjukkan berbagai capaian, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun pemberdayaan masyarakat perikanan. Beberapa capaian utama antara lain:

1. Peningkatan Produksi Perikanan

- Produksi perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun.
- Terjadi diversifikasi komoditas unggulan, antara lain bandeng, udang vaname, dan nila.

2. Pelayanan kepada Nelayan dan Pembudidaya

- Fasilitasi sarana prasarana (alat tangkap, benih, pakan, dan peralatan budidaya).
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan perikanan secara rutin.

3. Penguatan Kelembagaan Perikanan

- Terbentuk dan aktifnya kelompok pembudidaya (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar), serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
- Meningkatnya partisipasi masyarakat pesisir dalam program pemberdayaan.

4. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Meningkatnya jumlah UMKM pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi sertifikasi mutu dan pelatihan.
- Promosi produk perikanan lokal melalui pameran, *Marketplace* dan kerja sama dengan pelaku usaha swasta.

5. Kampanye Gemarikan (Gemar Makan Ikan)

- Terlaksananya sosialisasi Gemarikan di sekolah, desa, dan komunitas masyarakat.
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan untuk gizi dan kesehatan.

Secara umum, pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar yang memerlukan perhatian khusus dalam periode Renstra berikutnya.

Tabel 2. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Sesuai Tabel Provinsi)

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat	√																		Indikator Tujuan PD
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)		√				1,09	1,09	1,6	1,7	1,95	3,08	1,60	1,92	3,22	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
3	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)		√				3	3	3	3	3,05	3,01	2,99	3,02	3,00	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
4	Persentase peningkatan luas ekosistem kawasan pesisir yang direhabilitasi (%)		√				10	10	15	20	25	16,13	60,96	24,35	50,42	100	100	100	100	Indikator Sasaran PD
5	Angka Konsumsi Ikan kabupaten Gresik (kg/kapita/tahun)		√				40	40	40,5	41	55,75	42,86	43,25	55,67	56,61	1,07	1,07	1,36	1,02	Indikator Sasaran PD
6	Persentase Ketercapaian Sasaran OPD (%)			√																Indikator Program PD
7	Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD																			Indikator Kegiatan PD
8	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						6	6	6	6	6	6	6	6	6					Indikator Sub Kegiatan PD
9	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8	8	8	8	8	8	8	8	8					Indikator Sub Kegiatan PD
10	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)																			Indikator Kegiatan PD
11	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						40	40	35	40	35	28	24	28	24					Indikator Sub Kegiatan PD
12	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																			Indikator Kegiatan PD
13	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						8	8	9	8	9	8	9	8	9					Indikator Sub Kegiatan PD
14	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						35	35	36	35	36	35	36	35	36					Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
15	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						15	15	16	15	16	15	16	15	16					Indikator Sub Kegiatan PD
16	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						11	11	12	11	12	11	12	11	12					Indikator Sub Kegiatan PD
17	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						5	5	6	5	6	5	6	5	6					Indikator Sub Kegiatan PD
18	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						4	4	3	4	3	4	0	4	0					Indikator Sub Kegiatan PD
19	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						160	160	161	160	161	160	161	160	161					Indikator Sub Kegiatan PD
20	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																			Indikator Kegiatan PD
21	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	12	12	12	12	12	12	12	12					Indikator Sub Kegiatan PD
22	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						20	20	22	20	22	20	22	20	22					Indikator Sub Kegiatan PD
23	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah																			Indikator Kegiatan PD
24	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						1	1	1	1	1	1	1	1	1					Indikator Sub Kegiatan PD
25	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						8	8	8	8	8	8	8	8	8					Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
26	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1		1		1		1					Indikator Sub Kegiatan PD
27	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						4	4	5	4	5	4	5	4	5					Indikator Sub Kegiatan PD
28	Produksi Perikanan Tangkap				√		11.11 5	11.23 7	11.41 7	11.61 1		11.11 5	11.45 9	11.45 1	13.12 4	100	100	100	100	Indikator Program PD
29	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)																			Indikator Kegiatan PD
30	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia								4		4		4		4					Indikator Sub Kegiatan PD
31	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia						2	2	30	2	30	2	30	2	30					Indikator Sub Kegiatan PD
32	Peningkatan pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten/kota																			Indikator Kegiatan PD
33	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya						76	76	330	76	330	76	330	76	330					Indikator Sub Kegiatan PD
34	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya								5		5		5		5					Indikator Sub Kegiatan PD
35	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha										2				2					Indikator Sub Kegiatan PD
36	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)																			Indikator Kegiatan PD
37	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)										12				12					Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
38	Produksi Perikanan Budidaya				√		138.5 79	142.7 35	147.0 18	151.4 29		138.5 79	142.7 46	146.6 97	152.5 57	100	100	100	100	Indikator Program PD
39	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya (Paket)																			Indikator Kegiatan PD
40	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas									15	10			72	10					Indikator Sub Kegiatan PD
41	Jumlah Kelompok Pembudidaya Ikan kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas									3	10			33	10					Indikator Sub Kegiatan PD
42	Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina (%)																			Indikator Kegiatan PD
43	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									1	3			1	3					Indikator Sub Kegiatan PD
44	Jumlah hasil ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan									100	1			76	1					Indikator Sub Kegiatan PD
45	Jumlah Pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidaya ikan di Darat										100				100					Indikator Sub Kegiatan PD
46	Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat										100				100					Indikator Sub Kegiatan PD
47	Luasan Kawasan Pesisir Yang direhabilitasi Tahun N				√		72	72	74,75	78		72	75,48	91,83	91,6	100	100	100	100	Indikator Program PD
48	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangan																			Indikator Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
49	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									4	4			4	4					Indikator Sub Kegiatan PD
50	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota									3	3			3	3					Indikator Sub Kegiatan PD
51	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan				√		84,6	85	85,5	86		84,61	85	78	80	100	100	100	100	Indikator Program PD
52	Angka konsumsi ikan				√		1,9	2	1,3	1,2		1,9	2,86	6,8	24,78	100	100	100	100	Indikator Program PD
53	Peningkatan Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang mempunyai Kelayakan Produk (unit)																			Indikator Kegiatan PD
54	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko									32	32			32	32					Indikator Sub Kegiatan PD
55	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)																			Indikator Kegiatan PD
56	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									170.288.402	200.000			164.866.985	200.000					Indikator Sub Kegiatan PD

No	Indikator	Tujuan PD	Sasaran PD	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi				Capaian				KET
							2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
57	Jumlah Kelompok Penerima Hibah									38	50			0	50					Indikator Sub Kegiatan PD

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Gresik, Dinas Perikanan menetapkan kelompok sasaran layanan sebagai berikut:

1. Pembudidaya Ikan

- Pelaku usaha budidaya ikan air tawar, air payau, dan laut.
- Sasaran layanan: penyediaan benih, pakan, teknologi budidaya, serta bimbingan teknis.

2. Nelayan dan Kelompok Usaha Nelayan

- Nelayan tradisional maupun modern yang melakukan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Gresik.
- Sasaran layanan: peningkatan sarana prasarana, penguatan kelembagaan, akses permodalan, serta perlindungan nelayan.

3. Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- UMKM, koperasi, dan industri pengolahan hasil perikanan.
- Sasaran layanan: fasilitasi sertifikasi mutu, pelatihan diversifikasi produk, promosi, dan akses pasar.

4. Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Komunitas masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir.
- Sasaran layanan: pemberdayaan ekonomi pesisir, konservasi ekosistem pesisir, serta peningkatan ketahanan pangan berbasis ikan.

5. Kelembagaan Perikanan

- Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan), Poklahsar (Kelompok Pengolah dan Pemasar), Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas)
- Sasaran layanan: pembinaan organisasi, peningkatan kapasitas, serta akses terhadap program pemerintah.

6. Masyarakat Umum

- Konsumen dan masyarakat luas.
- Sasaran layanan: kampanye gemar makan ikan, penyediaan informasi publik, serta edukasi gizi berbasis ikan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan terpadu, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menjalin kemitraan dengan berbagai mitra antara lain:

1. HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) Kabupaten Gresik

Dalam bermitra dengan HNSI Dinas Perikanan dibantu dalam menjangkau komunitas nelayan, mendukung program pelatihan, penyuluhan, dan pengembangan kapasitas nelayan. Selain itu, HNSI dapat mendorong penerapan subsidi BBM dan regulasi alat tangkap ramah lingkungan.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memperoleh dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka memperkuat pencapaian kinerja pembangunan sektor perikanan. BUMD Kabupaten Gresik yang memberi dukungan yaitu PT. Gresik migas, dimana memberi dukungan berupa layanan pemberian BBM bersubsidi kepada para pelaku usaha Perikanan dan PT. Gresik Propertindo sebagai anak perusahaan PT. Gresik Migas dalam layanan pengoperasian UPL.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pembangunan sektor perikanan yang berdaya saing, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menjalin berbagai bentuk kerja sama dengan mitra strategis, baik antar perangkat daerah, antar pemerintah daerah, maupun dengan pihak swasta dan lembaga lain. Kerja sama tersebut meliputi:

a. Kerja Sama Antar Kabupaten/Kota

- Pertukaran informasi data produksi dan pemasaran hasil perikanan dengan kabupaten/kota sekitar (Lamongan, Sidoarjo, Tuban, Surabaya).
- Kolaborasi pengelolaan wilayah pesisir dan perairan yang berbatasan langsung.

b. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

- Dukungan program budidaya ikan, bantuan sarana prasarana Perikanan serta penguatan kelembagaan nelayan/pembudidaya.
- Kolaborasi dalam kampanye *Gemarikan* dan ketahanan pangan berbasis ikan.

c. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat/Kementerian

- Program bantuan kapal, alat tangkap ramah lingkungan, benih, dan pakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

- Pelatihan SDM perikanan melalui Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP).

d. Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

- Penelitian bersama terkait teknologi budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan konservasi ekosistem pesisir.

e. Kerja Sama dengan Swasta/BUMS

- Kemitraan pemasaran produk perikanan dengan perusahaan pengolahan dan distribusi.
- Investasi sektor perikanan (budidaya, pengolahan, ekspor).

f. Kerja Sama dengan Lembaga Keuangan/Perbankan

- Akses pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan.
- Skema kredit usaha rakyat (KUR) sektor perikanan.

g. Kerja Sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas

- Pemberdayaan masyarakat pesisir.
- Program konservasi dan pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat.

Dengan adanya kerja sama tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dapat memperluas jaringan pelayanan, meningkatkan daya dukung sumber daya, serta mempercepat pencapaian target kinerja pembangunan perikanan di daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Kabupaten Gresik memiliki potensi perikanan tangkap, budidaya, garam rakyat, serta pengolahan hasil perikanan yang cukup besar. Potensi tersebut diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung ketahanan pangan berbasis ikan. Namun demikian, dalam pengelolaannya masih ditemui berbagai permasalahan dan isu strategis yang memerlukan perhatian serius.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah biasanya muncul karena beberapa faktor internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja, efektivitas, dan kepuasan masyarakat. Berikut merupakan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Dinas Perikanan :

A. Permasalahan Pokok

- Penurunan kualitas perairan akibat limbah industri, pencemaran pesisir, dan berkurangnya kualitas air Bengawan Solo yang berpengaruh langsung terhadap produksi perikanan budidaya maupun tangkap.
- Fluktuasi harga ikan dan garam yang seringkali merugikan nelayan dan petambak karena lemahnya posisi tawar dalam rantai pemasaran.

- Keterbatasan sarana prasarana perikanan, seperti TPI yang belum sepenuhnya representatif, cold storage yang masih terbatas, serta laboratorium kesehatan ikan yang belum terakreditasi penuh.
- Konflik nelayan yang masih sering terjadi, baik antar kelompok nelayan maupun akibat penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
- Rendahnya daya saing produk olahan ikan karena keterbatasan inovasi, sertifikasi, dan akses pasar modern.
- Terbatasnya literasi digital dan akses permodalan nelayan, pembudidaya, dan pelaku UMKM perikanan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis perangkat daerah biasanya merujuk pada permasalahan pokok yang berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah, serta memerlukan perhatian khusus dari pimpinan daerah maupun perangkat daerah. Berikut merupakan isu strategis yang terjadi di Dinas Perikanan :

A. Isu Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

- Menurunnya kualitas lingkungan pesisir akibat ekspansi industri dan reklamasi.
- Ancaman overfishing di perairan tertentu.
- Kebutuhan peningkatan ketahanan pangan berbasis ikan untuk mendukung gizi masyarakat.
- Tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi siklus budidaya dan keberlanjutan sumber daya perikanan.

B. Isu Lingkungan Dinamis

- Global: perubahan iklim, tuntutan pasar internasional atas produk perikanan berkelanjutan dan bersertifikasi.
- Nasional: penerapan kebijakan *penangkapan terukur* Kementerian Kelautan dan Perikanan, program *kampung bandeng* dan gerakan *gemar makan ikan*.
- Regional (Jawa Timur): kompetisi produksi dengan daerah sentra perikanan lain seperti Lamongan dan Sidoarjo.
- Lokal (Gresik): industrialisasi pesisir, peningkatan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat, serta keterbatasan lahan tambak akibat alih fungsi lahan.

C. Isu Strategis Perangkat Daerah

- Peningkatan produktivitas perikanan tangkap, budidaya, dan garam rakyat secara berkelanjutan.
- Diversifikasi produk dan hilirisasi perikanan untuk meningkatkan nilai tambah.
- Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya melalui dukungan sarana, modal, serta akses pasar.
- Penguatan kelembagaan nelayan, POKMASWAS dan kelompok pengolah pemasaran hasil perikanan (POKLAHSAR).
- Peningkatan layanan laboratorium dan TPI agar lebih profesional, transparan, dan berbasis teknologi informasi.
- Penguatan kapasitas aparatur serta penerapan *e-government* di bidang perikanan.

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
Sumber daya perikanan tangkap dan budidaya (laut, payau, tawar)	Produksi belum optimal, teknologi budidaya rendah	Pelayanan penyediaan sarana prasarana budidaya, penyuluhan	Perubahan iklim mempengaruhi ekosistem perairan	Program KKP untuk peningkatan produksi dan budidaya berkelanjutan	Potensi pengembangan tambak bandeng & udang di pesisir Gresik	Peningkatan produksi perikanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
Kelompok nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan	Kesejahteraan rendah, akses pasar dan modal terbatas	Fasilitasi permodalan, asuransi nelayan, pembinaan UMKM	Harga ikan dunia fluktuatif	KUR sektor perikanan	Persaingan produk antar daerah di Jawa Timur	Peningkatan kesejahteraan dan daya saing nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan
Produk olahan hasil perikanan lokal	Mutu dan diversifikasi produk rendah, akses pasar terbatas	Sertifikasi mutu, promosi, fasilitasi pemasaran	Standar mutu produk ekspor semakin ketat	Gerakan Bangga Buatan Indonesia	Potensi pasar olahan ikan di daerah sekitar Gresik	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan olahan
Konsumsi ikan masyarakat	Tingkat konsumsi ikan masih rendah	Kampanye Gemarikan, edukasi gizi berbasis ikan	Tren makanan sehat berbasis protein	Program Gemarikan	Konsumsi ikan Jatim masih di bawah target nasional	Peningkatan literasi gizi dan konsumsi ikan masyarakat

BAB III TUJUAN, SARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari reencana strategis Dinas Perikanan yaitu Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan sasaran dari dinas Perikanan yaitu

1. Meningkatkan gizi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan.

Dengan Indikator yaitu Angka Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)

2. Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan

Dengan Indikator yaitu :

- a. Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)
- b. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)
- c. Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)

3. Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya

Dengan Indikator yaitu :

- a. Persentase penurunan konflik nelayan (%)
- b. Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)
- c. Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)
- d. Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran dari Dinas Perikanan :

Tabel 4. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
3.25.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERIKANAN											
- Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat		Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)	82,5	78.60-82.50	80.30-84.50	82.00-87.00	83.80-89.50	85.50-92.00	87.30-94.50	
			Rasio Net Ekspor (%)	10,51	10.77-11.80	10.80-12.00	10.84-12.20	10.87-12.40	10.91-12.60	10.94-12.80	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)	60,12	-65,09	-65,16	-65,24	-65,32	-65,4	-65,48	
			Indeks Pemerintah Digital (Angka)	4,32	-4,37	1.79-2.1	1.89-2.25	1.99-2.39	2.09-2.54	2.19-2.68	
			Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)	80,62	80,9	8,2	81,5	81,8	82,1	82,4	
			Indeks Sistem Merit (Angka)	310,5	315	330	345	360	375	390	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
			Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)	48,87	48	46	44	42	40	38	
		Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	56,6	57,73	58,94	60,24	61,63	63,11	64,68	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	3,22	3,23	3,24	3,25	3,26	3,27	3,28	
			Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	2,24	2,43	2,44	2,45	2,46	2,48	2,5	
			Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	-31,2	0,96	1,21	1,3	1,48	1,55	1,72	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	-18,29	2,78	2,86	2,94	3,03	3,13	3,23	
			Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	15	20	25	30	35	40	45	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	42,8	43	43,2	43,5	43,9	44,2	44,5	
			Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	58,8	17,6	65	68	70	73	75	

Tabel 3.4. Pentahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP 1 (2026)	TAHAP 2 (2027)	TAHAP 3 (2028)	TAHAP 4 (2029)	TAHAP 5 (2030)
Penguatan Infrastruktur Ekonomi	Penguatan Pelayanan Dasar	Pemerataan Akses Layanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Daerah	Konsolidasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan
- Revitalisasi sarana dan prasarana di Unit Pengolahan Ikan - Fasilitasi pemberian bantuan sosial pada musim tertentu kepada nelayan - Pemberian sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap dan budidaya yang lebih modern	- Peningkatan layanan penyuluhan & pelatihan kepada nelayan dan pembudidaya - Perluasan kampanye <i>Gemar ikan</i> untuk peningkatan konsumsi ikan.	- Peningkatan pemerataan layanan penyuluhan dan pengawasan perairan di seluruh kecamatan - Pemberdayaan kelompok perikanan (Pokdakan, Poklahsar, Pokmaswas). - Digitalisasi layanan perikanan berbasis aplikasi.	- Pemberian pelatihan untuk diversifikasi produk olahan perikanan agar mampu berdaya saing - Kolaborasi antar bidang untuk peningkatan nelayan dan pembudidaya.	Integrasi pengelolaan Perikanan berkelanjutan dengan tata ruang wilayah pesisir.

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dinas Perikanan Kabupaten Gresik memiliki strategi yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperluas kampanye *Gemarikan* di sekolah, pesantren, dan masyarakat umum.
2. Mengembangkan diversifikasi produk olahan ikan yang sesuai selera lokal.
3. Meningkatkan distribusi ikan segar dan olahan ke wilayah pedesaan dan perkotaan.
4. Intensifikasi budidaya ikan dan udang dengan teknologi ramah lingkungan.
5. Revitalisasi tambak garam rakyat dengan teknologi modern.
6. Peningkatan kapasitas nelayan melalui modernisasi alat tangkap ramah lingkungan.
7. Meningkatkan efektivitas pengawasan sumber daya perikanan berbasis masyarakat (*Pokmaswas*)
8. Mendorong resolusi konflik antar nelayan melalui mediasi berbasis kelembagaan
9. Mengadakan pelatihan reguler bagi kelompok nelayan dan pembudidaya
10. Memfasilitasi sertifikasi mutu dan halal bagi UMKM perikanan
11. Mendorong hilirisasi produk perikanan dan inovasi produk olahan
12. Penguatan kelembagaan masyarakat dalam konservasi pesisir.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Kebijakan yang diambil Dinas Perikanan Kabupaten Gresik demi mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal
2. Meningkatkan kualitas dan akseibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan
3. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi
4. Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra

No	NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
1	Meningkatkan kualitas dan akseibilitas	Meningkatkan produktivitas masyarakat melalui derajat kesehatan	Meningkatkan konsumsi ikan melalui kampanye <i>Gemarikan</i> , edukasi	

	penyelenggaraan layanan dasar kesehatan	yang optimal dan investasi berkelanjutan di sektor kesehatan, termasuk pengembangan ekonomi kesehatan berbasis inovasi layanan dan teknologi.	gizi, dan distribusi ikan segar/olahan	
2	Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal	Mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok modern, memperluas akses pasar domestik dan ekspor, serta mengembangkan sistem perdagangan yang berbasis nilai tambah produk lokal.	Peningkatan produktivitas perikanan tangkap, budidaya serta usaha garam rakyat dengan pemberian sarana dan prasarana yang memadai	
3	Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Peningkatan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang merata untuk semua kelompok, termasuk kelompok rentan dan marjinal, guna mengurangi ketimpangan sosial secara struktural.	memfasilitasi kebijakan demi mendukung pemberian bantuan kepada pelaku usaha Perikanan secara tepat, serta memberikan pelatihan dan penguatan kelembagaan untuk pelaku usaha Perikanan.	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan strategis. Program-program ini dirancang untuk menjawab permasalahan dan isu strategis sektor Perikanan. Berikut program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas Dinas Perikanan.

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan:

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan:

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan:

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan Ekstraksi Garam

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan :

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan, daya saing ekonomi daerah serta kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan hingga 2030.

Tabel 4.1. Rumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
3.25.0.00.0.00.21.0000 - DINAS PERIKANAN							
- Meningkatkan kualitas dan aksebilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan daya saing sektor perdagangan berbasis potensi lokal - Mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan menghapus ketimpangan sosial ekonomi	Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat				Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (Angka)		
					Rasio Net Ekspor (%)		
					Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Angka)		
					Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
					Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (Angka)		
					Indeks Sistem Merit (Angka)		
					Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
					Indeks Kemiskinan Multidimensi (%)		
		Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan			Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)		
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat		Pertumbuhan angka konsumsi ikan (Ton/Tahun)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
				Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan (Dokumen)	3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
				Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan			Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)		
					Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)		
					Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan (%)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
					Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Peningkatan nelayan yang memperoleh pelatihan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
				Peningkatan Fasilitas Pengelolaan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya (%)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
					Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya			Persentase penurunan konflik nelayan (%)		
					Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)		
					Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)		
			Tercapainya sasaran program OPD		Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati		Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dan dibina	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam	

4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, maka diperlukan perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terarah, terukur, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan tersebut sekaligus menjadi instrumen operasional dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan pendanaan disusun dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gresik 2025–2029.
2. Ketersediaan sumber daya dan kapasitas fiskal daerah, sehingga program/kegiatan dapat dilaksanakan secara realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Keadilan dan pemerataan wilayah, agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat pesisir, nelayan, dan pembudidaya di seluruh kecamatan.

Secara umum, rencana program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Dengan kegiatan yaitu kampanye *Gemarikan*, edukasi gizi di sekolah dan masyarakat, diversifikasi olahan ikan.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Dengan kegiatan yaitu Modernisasi armada tangkap dengan memberikan bantuan alat tangkap ramah lingkungan, penguatan sumberdaya kelompok nelayan

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Dengan kegiatan yaitu memberikan bantuan sarana dan prasarana peralatan budidaya serta pemberian bimbingan teknis mengenai cara pembudidayaan yang benar

4. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Dengan kegiatan yaitu melakukan pengawasan terhadap kelompok-kelompok Perikanan dan berkegiatan menurunkan konflik nelayan.

Berikut merupakan tabel penjelasan mengenai rencana program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan pada Dinas Perikanan.

Tabel 4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				9.796.014.000,00		10.086.541.000,00		10.456.934.000,00		10.980.794.000,00		11.316.026.000,00	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.613.038.000,00		6.809.166.000,00		7.059.208.000,00		7.372.462.000,00		7.639.159.000,00	
Tercapainya sasaran program OPD	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	100	100	6.613.038.000,00	100	6.809.166.000,00	100	7.059.208.000,00	100	7.372.462.000,00	100	7.639.159.000,00	
3.25.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33.504.096,00		34.492.466,00		35.758.346,00		37.070.670,00		38.201.327,00	
Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi OPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			33.504.096,00		34.492.466,00		35.758.346,00		37.070.670,00		38.201.327,00	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah												
3.25.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				29.808.243,00		30.687.586,00		31.813.826,00		32.981.387,00		33.987.320,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			29.808.243,00		30.687.586,00		31.813.826,00		32.981.387,00		33.987.320,00	
3.25.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.695.853,00		3.804.880,00		3.944.520,00		4.089.283,00		4.214.007,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.695.853,00		3.804.880,00		3.944.520,00		4.089.283,00		4.214.007,00	
3.25.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
3.25.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			5.203.418.900,00		5.357.963.135,00		5.554.745.988,00		5.812.786.241,00		6.031.913.124,00	
3.25.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				281.556.709,00		289.862.633,00		300.500.591,00		311.528.962,00		321.030.594,00	
Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			281.556.709,00		289.862.633,00		300.500.591,00		311.528.962,00		321.030.594,00	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan												
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												
3.25.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				13.255.760,00		13.646.805,00		14.147.642,00		14.666.860,00		15.114.199,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			13.255.760,00		13.646.805,00		14.147.642,00		14.666.860,00		15.114.199,00	
3.25.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				37.343.718,00		38.445.358,00		39.856.302,00		41.319.029,00		42.579.259,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			37.343.718,00		38.445.358,00		39.856.302,00		41.319.029,00		42.579.259,00	
3.25.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				10.535.892,00		10.846.701,00		11.244.775,00		11.657.458,00		12.013.010,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			10.535.892,00		10.846.701,00		11.244.775,00		11.657.458,00		12.013.010,00	
3.25.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				58.799.603,00		60.534.191,00		62.755.796,00		65.058.934,00		67.043.231,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			58.799.603,00		60.534.191,00		62.755.796,00		65.058.934,00		67.043.231,00	
3.25.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				12.674.461,00		13.048.358,00		13.527.233,00		14.023.682,00		14.451.404,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			12.674.461,00		13.048.358,00		13.527.233,00		14.023.682,00		14.451.404,00	
3.25.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.209.611,00		2.274.795,00		2.358.280,00		2.444.829,00		2.519.396,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2.209.611,00		2.274.795,00		2.358.280,00		2.444.829,00		2.519.396,00	
3.25.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.242.791,00		77.462.453,00		80.305.325,00		83.252.530,00		85.791.733,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			75.242.791,00		77.462.453,00		80.305.325,00		83.252.530,00		85.791.733,00	
3.25.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				71.494.873,00		73.603.972,00		76.305.238,00		79.105.640,00		81.518.362,00	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			71.494.873,00		73.603.972,00		76.305.238,00		79.105.640,00		81.518.362,00	
3.25.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				759.622.920,00		782.031.797,00		810.732.362,00		840.486.239,00		866.121.072,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			759.622.920,00		782.031.797,00		810.732.362,00		840.486.239,00		866.121.072,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan												
3.25.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				86.865.266,00		89.427.792,00		92.709.790,00		96.112.239,00		99.043.665,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			86.865.266,00		89.427.792,00		92.709.790,00		96.112.239,00		99.043.665,00	
3.25.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				672.757.654,00		692.604.005,00		718.022.572,00		744.374.000,00		767.077.407,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			672.757.654,00		692.604.005,00		718.022.572,00		744.374.000,00		767.077.407,00	
3.25.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				334.935.375,00		344.815.969,00		357.470.713,00		370.589.888,00		381.892.883,00	
Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			334.935.375,00		344.815.969,00		357.470.713,00		370.589.888,00		381.892.883,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi												
3.25.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.961.706,00		42.170.076,00		43.717.716,00		45.322.156,00		46.704.485,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			40.961.706,00		42.170.076,00		43.717.716,00		45.322.156,00		46.704.485,00	
3.25.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				51.796.481,00		53.324.477,00		55.281.486,00		57.310.316,00		59.058.281,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			51.796.481,00		53.324.477,00		55.281.486,00		57.310.316,00		59.058.281,00	
3.25.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				229.153.103,00		235.913.120,00		244.571.131,00		253.546.892,00		261.280.072,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			229.153.103,00		235.913.120,00		244.571.131,00		253.546.892,00		261.280.072,00	
3.25.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				13.024.085,00		13.408.296,00		13.900.380,00		14.410.524,00		14.850.045,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			13.024.085,00		13.408.296,00		13.900.380,00		14.410.524,00		14.850.045,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				648.644.000,00		667.881.000,00		692.407.000,00		727.077.000,00		749.292.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan	42.8	43	648.644.000,00	43.5	667.881.000,00	43.9	692.407.000,00	44.2	727.077.000,00	44.5	749.292.000,00	
	Produksi Perikanan Tangkap	13547	14165		14474		14783		15092		15401		
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				368.506.304,00		379.479.243,00		393.420.898,00		407.841.878,00		425.781.563,00	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			368.506.304,00		379.479.243,00		393.420.898,00		407.841.878,00		425.781.563,00	
	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia												
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				37.662.600,00		38.773.573,00		40.196.755,00		41.671.916,00		43.493.933,00	
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia			37.662.600,00		38.773.573,00		40.196.755,00		41.671.916,00		43.493.933,00	
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				330.843.704,00		340.705.670,00		353.224.143,00		366.169.962,00		382.287.630,00	
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia			330.843.704,00		340.705.670,00		353.224.143,00		366.169.962,00		382.287.630,00	
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				207.089.617,00		213.198.759,00		221.023.154,00		238.393.703,00		239.152.578,00	
Peningkatan nelayan yang memperoleh pelatihan	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			207.089.617,00		213.198.759,00		221.023.154,00		238.393.703,00		239.152.578,00	
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya												
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				172.023.971,00		177.098.678,00		183.598.200,00		199.595.253,00		198.657.842,00	
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya			172.023.971,00		177.098.678,00		183.598.200,00		199.595.253,00		198.657.842,00	
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				35.065.646,00		36.100.081,00		37.424.954,00		38.798.450,00		40.494.736,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBPROGRAM OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya			35.065.646,00		36.100.081,00		37.424.954,00		38.798.450,00		40.494.736,00	
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
Peningkatan Fasilitas Pengelolaan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				1.156.118.000,00		1.190.405.000,00		1.234.119.000,00		1.295.456.000,00		1.335.508.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya	-	22	1.156.118.000,00	24	1.190.405.000,00	26	1.234.119.000,00	28	1.295.456.000,00	30	1.335.508.000,00	
	Produksi Perikanan Budidaya	155,972.01	163,564.00		167,361.00		171,157.00		174,954.00		178,750.00		
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				965.713.493,00		994.384.102,00		1.030.904.032,00		1.084.694.929,00		1.118.409.518,00	
Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			965.713.493,00		994.384.102,00		1.030.904.032,00		1.084.694.929,00		1.118.409.518,00	
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas												
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				940.519.793,00		968.447.403,00		1.004.015.047,00		1.056.719.320,00		1.089.683.710,00	
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas			940.519.793,00		968.447.403,00		1.004.015.047,00		1.056.719.320,00		1.089.683.710,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				25.193.700,00		25.936.699,00		26.888.985,00		27.975.609,00		28.725.808,00	
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan			25.193.700,00		25.936.699,00		26.888.985,00		27.975.609,00		28.725.808,00	
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				190.404.507,00		196.020.898,00		203.214.968,00		210.761.071,00		217.098.482,00	
Peningkatan Jumlah Pembudidaya ikan yang dibina	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			190.404.507,00		196.020.898,00		203.214.968,00		210.761.071,00		217.098.482,00	
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan												
	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan												
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat												
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				19.256.588,00		19.824.115,00		20.551.764,00		21.306.020,00		21.955.847,00	
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan			19.256.588,00		19.824.115,00		20.551.764,00		21.306.020,00		21.955.847,00	
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				51.081.192,00		52.588.087,00		54.518.070,00		56.557.988,00		58.242.709,00	
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			51.081.192,00		52.588.087,00		54.518.070,00		56.557.988,00		58.242.709,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				94.979.984,00		97.781.894,00		101.370.489,00		105.099.788,00		108.296.054,00	
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			94.979.984,00		97.781.894,00		101.370.489,00		105.099.788,00		108.296.054,00	
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				25.086.743,00		25.826.802,00		26.774.645,00		27.797.275,00		28.603.872,00	
Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan			25.086.743,00		25.826.802,00		26.774.645,00		27.797.275,00		28.603.872,00	
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan	-	44	172.860.000,00	48	177.987.000,00	52	184.523.000,00	52.3	193.699.000,00	53.2	199.683.000,00	
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	
Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dan dibina	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota			172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota												
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota												
	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya												

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				84.436.570,00		86.954.865,00		90.149.955,00		95.862.469,00		98.862.254,00	
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota			84.436.570,00		86.954.865,00		90.149.955,00		95.862.469,00		98.862.254,00	
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				-		-		-		-		-	
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota			-		-		-		-		-	
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				88.423.430,00		91.032.135,00		94.373.045,00		97.836.531,00		100.820.746,00	
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota			88.423.430,00		91.032.135,00		94.373.045,00		97.836.531,00		100.820.746,00	
3.25.05.2.01.0012 - Pengawasan Ekstraksi Garam				-		-		-		-		-	
Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya			-		-		-		-		-	
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				1.205.354.000,00		1.241.102.000,00		1.286.677.000,00		1.392.100.000,00		1.392.384.000,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	1.69	2-4	1.205.354.000,00	2-4	1.241.102.000,00	2-4	1.286.677.000,00	2-4	1.392.100.000,00	2-4	1.392.384.000,00	
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan			26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	
3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri				26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	
Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan			26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				1.178.886.750,00		1.213.663.800,00		1.258.205.244,00		1.362.205.095,00		1.361.409.520,00	
Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			1.178.886.750,00		1.213.663.800,00		1.258.205.244,00		1.362.205.095,00		1.361.409.520,00	
	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota												
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				63.153.176,00		65.016.061,00		67.402.177,00		70.772.258,00		72.930.811,00	
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			63.153.176,00		65.016.061,00		67.402.177,00		70.772.258,00		72.930.811,00	
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.115.733.574,00		1.148.647.739,00		1.190.803.067,00		1.291.432.837,00		1.288.478.709,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi			1.115.733.574,00		1.148.647.739,00		1.190.803.067,00		1.291.432.837,00		1.288.478.709,00	

Program tahun 2030 merupakan bagian dari Upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah 2030 sebelum ditetapkan peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah.

4.3 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan beberapa Sub Kegiatan Prioritas yang berorientasi pada Gresik Agropolitan, dengan Outcome yaitu Nelayan Gresik Berdaulat dan Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan Peningkatan Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan. Dengan program yang menangani yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Program prioritas ini dipilih karena memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung prioritas Pembangunan daerah.

Tabel 4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Gresik Agropolitan	Nelayan Gresik Berdaulat	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
			Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
2		Pembangunan Techno Park berbasis Minapolitan Peningkatan Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan	Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Pengembangan Kapasitas Pembudidayaan Ikan Kecil	
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
			Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
			Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
3			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
			Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Dalam dokumen RPJMN 2025–2029, salah satu Prioritas Nasional (PN) 2 adalah “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.”

Sektor kelautan dan perikanan, khususnya melalui Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, memiliki peran penting dalam mendukung agenda tersebut, terutama pada aspek swasembada pangan berbasis ikan, serta penguatan ekonomi biru dan ekonomi hijau. Oleh karena itu, Dinas Perikanan menetapkan beberapa program, kegiatan serta sub kegiatan yang mendukung beberapa kegiatan prioritas utama tersebut. Berikut tabel mengenai kegiatan prioritas yang secara langsung mendukung pencapaian Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kegiatan Prioritas Utama : Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)												
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		14438	648.644.000,00	14907	667.881.000,00	15393	692.407.000,00	15897	727.077.000,00	16418	749.292.000,00	Program
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			368.506.304,00		379.479.243,00		393.420.898,00		407.841.878,00		425.781.563,00	Kegiatan
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	4	37.662.600,00	4	38.773.573,00	4	40.196.755,00	4	41.671.916,00	4	43.493.933,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	31	330.843.704,00	32	340.705.670,00	33	353.224.143,00	34	366.169.962,00	35	382.287.630,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			207.089.617,00		213.198.759,00		221.023.154,00		238.393.703,00		239.152.578,00	Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	Kegiatan
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6	73.048.079,00	7	75.202.998,00	8	77.962.948,00	9	80.841.419,00	10	84.357.859,00	Sub-Kegiatan
Kegiatan Prioritas Utama :Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut												
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		163.665	1.156.118.000,00	167.671	1.190.405.000,00	171.797	1.234.119.000,00	176.054	1.295.456.000,00	180.450	1.335.508.000,00	Program
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			965.713.493,00		994.384.102,00		1.030.904.032,00		1.084.694.929,00		1.118.409.518,00	Kegiatan
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub-Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			190.404.507,00		196.020.898,00		203.214.968,00		210.761.071,00		217.098.482,00	Kegiatan
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	19.256.588,00	1	19.824.115,00	1	20.551.764,00	1	21.306.020,00	5	21.955.847,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	Sub-Kegiatan
Kegiatan Prioritas Utama : Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan Laut												
Kegiatan Prioritas Utama :Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut												
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		44	172.860.000,00	48	177.987.000,00	52	184.523.000,00	52,3	193.699.000,00	53,2	199.683.000,00	Program
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	Kegiatan
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	84.436.570,00	15	86.954.865,00	20	90.149.955,00	25	95.862.469,00	30	98.862.254,00	Sub-Kegiatan
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	88.423.430,00	15	91.032.135,00	20	94.373.045,00	25	97.836.531,00	30	100.820.746,00	Sub-Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Kegiatan Prioritas Utama :Penguatan Ekosistem Pendukung Makan Bergizi												
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		2-4	1.205.354.000,00	2-4	1.241.102.000,00	2-4	1.286.677.000,00	2-4	1.392.100.000,00	2-4	1.392.384.000,00	Program
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	Kegiatan
3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	30	26.467.250,00	30	27.438.200,00	32	28.471.756,00	33	29.894.905,00	35	30.974.480,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.178.886.750,00		1.213.663.800,00		1.258.205.244,00		1.362.205.095,00		1.361.409.520,00	Kegiatan
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kg	223.343.552	63.153.176,00	223.343.600	65.016.061,00	223.343.700	67.402.177,00	223.343.800	70.772.258,00	223.344.000	72.930.811,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan

4.5 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen RPJMN Tahun 2025–2029 serta keselarasan dengan Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sub kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Gresik yang secara langsung mendukung pelaksanaan Proyek Prioritas Nasional (PPN).

Hal ini dikarenakan proyek strategis nasional pada periode 2025–2029 lebih banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur strategis berskala nasional, konektivitas, serta proyek lintas sektor yang bukan menjadi kewenangan langsung perangkat daerah di bidang kelautan dan perikanan.

Namun demikian, program dan sub kegiatan Dinas Perikanan tetap memiliki keterkaitan tidak langsung dengan pencapaian prioritas pembangunan nasional, khususnya dalam mendukung swasembada pangan berbasis ikan, penguatan ekonomi biru, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan, yang merupakan bagian dari Prioritas Nasional 2 RPJMN 2025–2029.

Tabel 4.4 Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
NIHIL												

4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, khususnya misi *“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”*, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menetapkan sejumlah sub kegiatan strategis. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik berkontribusi dalam memperkuat kemandirian pangan, mengembangkan ekonomi kreatif dan digital, serta menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir melalui ekonomi hijau dan ekonomi biru sesuai arah Asta Cita Presiden. Sub kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis ikan, mendorong tumbuhnya ekonomi kreatif melalui produk perikanan, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir sesuai prinsip ekonomi hijau dan ekonomi biru. Berikut merupakan tabel Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Tabel 4.6 Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Asta Cita : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru												
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		14438	648.644.000,00	14907	667.881.000,00	15393	692.407.000,00	15897	727.077.000,00	16418	749.292.000,00	Program
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			368.506.304,00		379.479.243,00		393.420.898,00		407.841.878,00		425.781.563,00	Kegiatan
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Dokumen	4	37.662.600,00	4	38.773.573,00	4	40.196.755,00	4	41.671.916,00	4	43.493.933,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Unit	31	330.843.704,00	32	340.705.670,00	33	353.224.143,00	34	366.169.962,00	35	382.287.630,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			207.089.617,00		213.198.759,00		221.023.154,00		238.393.703,00		239.152.578,00	Kegiatan
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Orang	125	172.023.971,00	140	177.098.678,00	160	183.598.200,00	185	199.595.253,00	200	198.657.842,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kelompok	1	35.065.646,00	2	36.100.081,00	3	37.424.954,00	4	38.798.450,00	5	40.494.736,00	Sub-Kegiatan
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			73.048.079,00		75.202.998,00		77.962.948,00		80.841.419,00		84.357.859,00	Kegiatan
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	6	73.048.079,00	7	75.202.998,00	8	77.962.948,00	9	80.841.419,00	10	84.357.859,00	Sub-Kegiatan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		163.665	1.156.118.000,00	167.671	1.190.405.000,00	171.797	1.234.119.000,00	176.054	1.295.456.000,00	180.450	1.335.508.000,00	Program
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			965.713.493,00		994.384.102,00		1.030.904.032,00		1.084.694.929,00		1.118.409.518,00	Kegiatan
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kelompok	11	940.519.793,00	12	968.447.403,00	13	1.004.015.047,00	14	1.056.719.320,00	15	1.089.683.710,00	Sub-Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			190.404.507,00		196.020.898,00		203.214.968,00		210.761.071,00		217.098.482,00	Kegiatan
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	19.256.588,00	1	19.824.115,00	1	20.551.764,00	1	21.306.020,00	5	21.955.847,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	3	51.081.192,00	4	52.588.087,00	4	54.518.070,00	4	56.557.988,00	5	58.242.709,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	110	94.979.984,00	120	97.781.894,00	130	101.370.489,00	140	105.099.788,00	150	108.296.054,00	Sub-Kegiatan
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	1	25.086.743,00	2	25.826.802,00	3	26.774.645,00	4	27.797.275,00	5	28.603.872,00	Sub-Kegiatan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		44	172.860.000,00	48	177.987.000,00	52	184.523.000,00	52,3	193.699.000,00	53,2	199.683.000,00	Program
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			172.860.000,00		177.987.000,00		184.523.000,00		193.699.000,00		199.683.000,00	Kegiatan
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	84.436.570,00	15	86.954.865,00	20	90.149.955,00	25	95.862.469,00	30	98.862.254,00	Sub-Kegiatan
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	88.423.430,00	15	91.032.135,00	20	94.373.045,00	25	97.836.531,00	30	100.820.746,00	Sub-Kegiatan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		2-4	1.205.354.000,00	2-4	1.241.102.000,00	2-4	1.286.677.000,00	2-4	1.392.100.000,00	2-4	1.392.384.000,00	Program

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	SATUAN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
		2026		2027		2028		2029		2030		
		TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			26.467.250,00		27.438.200,00		28.471.756,00		29.894.905,00		30.974.480,00	Kegiatan
3.25.06.2.01.0002 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Dokumen	30	26.467.250,00	30	27.438.200,00	32	28.471.756,00	33	29.894.905,00	35	30.974.480,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			1.178.886.750,00		1.213.663.800,00		1.258.205.244,00		1.362.205.095,00		1.361.409.520,00	Kegiatan
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kg	223.343.552	63.153.176,00	223.343.600	65.016.061,00	223.343.700	67.402.177,00	223.343.800	70.772.258,00	223.344.000	72.930.811,00	Sub-Kegiatan
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaku Usaha	51	1.115.733.574,00	52	1.148.647.739,00	53	1.190.803.067,00	54	1.291.432.837,00	55	1.288.478.709,00	Sub-Kegiatan

4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 ditetapkan sebagai arah capaian yang harus diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun. Target tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi awal tahun 2025, proyeksi kebutuhan pembangunan daerah, serta kemampuan sumber daya yang dimiliki. Berikut merupakan target keberhasilan pencapaian indicator kinerja utama dinas Perikanan.

Tabel 4.7 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/tahun	57.73	57.73	58.94	60.24	61.63	63.11	64.68	64.68
2	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap	%	3.23	3.23	3.24	3.25	3.26	3.27	3.28	3.28
3	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya	%	2.43	2.43	2.44	2.45	2.46	2.48	2.50	2.50
4	Pertumbuhan Produksi Garam Rakyat	%	0.96	0.96	1.21	1.30	1.48	1.55	1.72	1.72
5	Persentase Penurunan Konflik Nelayan	%	2.78	2.78	2.86	2.94	3.03	3.13	3.23	3.23
6	Jumlah pelaku usaha perairan umum yang diawasi	Orang	20	20	25	30	35	40	45	45
7	Persentase pelatihan kelompok nelayan	%	43	43	43.2	43.5	43.9	44.2	44.5	44.5
8	Persentase fasilitasi kebijakan kesejahteraan nelayan	%	17.6	17.6	65	68	70	73	75	75

4.8 Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan tolok ukur capaian yang lebih rinci dalam mendukung keberhasilan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKK digunakan untuk memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat tercapai melalui kegiatan teknis yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut merupakan target keberhasilan pencapaian

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029.

Tabel 4.8 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2030

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Awal Tahun 2025	Target						Kondisi Akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok nelayan	%	42,8	42,8	43	43,5	43,9	44,2	44,5	44,5
3	Produksi Perikanan Tangkap	Kg	13.547	13.547	14.165	14.474	14.783	15.092	15.401	15.401
4	Persentase pelatihan/pembinaan terhadap kelompok budidaya	%			22	24	26	26	30	30
5	Produksi Perikanan Budidaya	Kg	155.972	155.972	163.564	167.361	171.157	174.954	178.750	178.750
6	Rasio kepatuhan pelaku usaha budidaya dan penangkapan ikan sesuai ketentuan				44	48	52	52,3	53,2	53,2
7	Pertumbuhan angka konsumsi ikan	%	1.69	1.69	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4	2-4

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan program pembangunan sektor perikanan. Renstra ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, dengan tetap mengacu pada kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Mekanisme Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Renstra

Pelaksanaan Renstra Dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perikanan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana kerja tahunan dituangkan dalam Renja PD dan selanjutnya dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan arah kebijakan, sasaran, indikator, dan target Renstra. Kepala Dinas bertanggung jawab melakukan koordinasi, pemantauan, dan supervisi terhadap pelaksanaan program/kegiatan.

3. Evaluasi

Evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir tahun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Evaluasi capaian sasaran dan indikator Renstra dilakukan pada pertengahan periode (midterm review) untuk mengukur kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan penajaman program/kegiatan di tahun berikutnya.

Mekanisme Perubahan Renstra

Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perubahan kebijakan nasional, provinsi, maupun daerah yang berdampak langsung pada sasaran strategis perangkat daerah
2. Terjadi dinamika atau kondisi yang tidak sesuai dengan asumsi awal perencanaan, seperti bencana, krisis ekonomi, maupun perubahan regulasi
3. Hasil evaluasi kinerja menunjukkan perlunya penyesuaian strategi, sasaran, atau indikator untuk meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan.

Perubahan Renstra ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Renstra ini, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terukur, dan akuntabel untuk mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan masyarakat

